

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi persediaan ke dalam Aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan;
- b. melaksanakan rekonsiliasi data persediaan secara berkala;
- c. mendokumentasikan arsip barang persediaan;
- d. melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

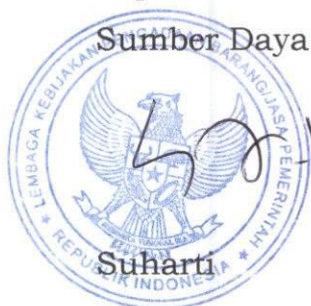
ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
UNIT ORGANISASI ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2023 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
1	Penanggung Jawab	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
4	Anggota	1. Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		2. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		3. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		5. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		6. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		7. Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		8. Gunawan Fredyasto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		9. Himawan Aditya	Inspektorat
		10. Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		11. Banjar Laga	Biro Perencanaan dan Keuangan
		12. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		13. Fairuz Nawfal Hamid	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		14. Lingga Sakti	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		15. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		16. Putri Ayu Permatasari	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		17. Abi Tonjo Buono	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		18. Eska Pratama Dian Kurniawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		19. Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Pengembangan Profesi
		20. Bernadus Sayratu Kuway	Direktorat Sertifikasi Profesi
		21. Desak Putu Ayunda Putri	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		22. Niken Mustikarini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		23. Tri Astutik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA